



2021

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

in Negeri Muara

GERI MUARA ENIM  
NI NO. 17 A

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI  
MUARA ENIM**

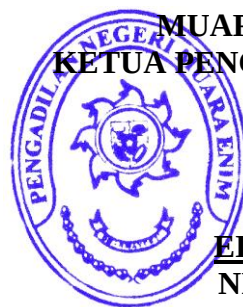
Jl. Jendral Ahmad Yani No 17A Muara Enim  
Telp/Fax. 0734 421194  
[www.pn-muaraenim.go.id](http://www.pn-muaraenim.go.id)

## KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2021 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2021.



**MUARA ENIM, 25 JANUARI 2022**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**ELVIN ADRIAN, SH., MH**  
**NIP 19790111 200212 1004**



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2015-2020 telah menetapkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung**”. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan



masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.



Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2021 yaitu :





1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Belanja   | Anggaran Semula     | Realisasi           | Persentase Realisasi |
|----|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | Belanja Pegawai | Rp. 3,864,875,000,- | Rp. 3,809,150,516,- | 98.56%               |
| 2  | Belanja Barang  | Rp. 1,217,739,000,- | Rp. 1,203,187,756,- | 98.81%               |
| 3  | Belanja Modal   | Rp. 65,000,000,-    | Rp. 64,774,000,-    | 99.65%               |

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

| No | Anggaran Semula   | Realisasi         | Persentase Realisasi |
|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Rp. 325,693,000,- | Rp. 325,176,300,- | 99.84%               |

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2021 sebagaimana terlihat tabel berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2021 :**

**SASARAN STRATEGIS I :**

**TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

| No. | Indikator Kinerja                                        | Target   | Realisasi | Capaian  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                          | Th. 2021 | Th. 2021  | Th. 2021 |
| a.  | Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :      | 100 %    | 100%      | 100%     |
| b.  | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :       | 100 %    | 100%      | 100%     |
| c.. | Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu | 100 %    | 100%      | 100%     |



|    |                                                                         |       |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| d. | Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu                 | 100 % | 100%    | 100%    |
| e. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding            | 100 % | 97,25 % | 97,25%  |
| f. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi             | 100 % | 98,08 % | 98,08 % |
| g. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 100 % | 99,76%  | 99,76%  |
| e. | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi         | 10 %  | 12,12 % | 121,2 % |
| f. | Index responden yang puas terhadap layanan peradilan                    | 100 % | 98,96 % | 98,96 % |

### SASARAN STRATEGIS II :

#### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                | Target   | Realisasi | Capaian  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                                                                                                  | Th. 2021 | Th. 2021  | Th. 2021 |
| a.  | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                            | 100 %    | 100%      | 100%     |
| b.  | Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                             | 100 %    | 100%      | 100%     |
| c.  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                                                             | 10 %     | 0%        | 0%       |
| d.  | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                    | 100 %    | 100%      | 100%     |
| e.  | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100 %    | 100%      | 100%     |



**SASARAN STRATEGIS III :**  
**MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN**

| Indikator Kinerja                                                                           | Target   | Realisasi | Capaian  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                                                                                             | Th. 2021 | Th. 2021  | Th. 2021 |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(posbakum) | 100 %    | 100 %     | 100 %    |

**SASARAN STRATEGIS IV :**  
**MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

| Indikator Kinerja                                                     | Target   | Realisasi | Capaian  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                                                                       | Th. 2021 | Th. 2021  | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 80%      | 0 %       | 0 %      |





## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                 | <b>2</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>DAFTAR GRAFIK .....</b>                                                                                                                  | <b>13</b> |
| <b>BABI     Pendahuluan.....</b>                                                                                                            | <b>15</b> |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                     | 15        |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                                                                                              | 16        |
| c. Sistematika Penyajian .....                                                                                                              | 17        |
| <b>BABII    Perencanaan dan Penetapan Kinerja.....</b>                                                                                      | <b>19</b> |
| A. Rencana Strategis 2015-2020.....                                                                                                         | 19        |
| 1. Visi dan Misi .....                                                                                                                      | 19        |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....                                                                                                       | 20        |
| B. Indikator Kinerja Utama .....                                                                                                            | 21        |
| C. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....                                                                                                         | 23        |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....                                                                                                       | 24        |
| <b>BABIII   Akuntabilitas Kinerja.....</b>                                                                                                  | <b>27</b> |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                                                                                                         | 27        |
| A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .....                                                                        | 27        |
| A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun<br>2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....                            | 81        |
| A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target<br>Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA2015-<br>2021..... | 83        |
| A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penur-<br>nan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....      | 87        |
| A.5 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....                                                                                      | 88        |
| A.6 Analisa atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/<br>Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....                              | 89        |



|              |                                 |            |
|--------------|---------------------------------|------------|
|              | B. Akuntabilitas Keuangan.....  | 90         |
|              | C. Monitoring dan Evaluasi..... | 99         |
| <b>BABIV</b> | <b>Penutup.....</b>             | <b>102</b> |
|              | B.Kesimpulan.....               | 102        |
|              | C.Saran.....                    | 103        |

**LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi
2. Penghargaan Yang Didapat
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021
4. Matriks RENSTRA 2015-2020
5. Penetapan Kinerja Tahun 2021
6. Kumpulan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri MuaraEnim



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2019 – 2021
- Tabel 2. Keadaan sisa perkara pidana Tahun 2019 – 2021
- Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2021
- Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021
- Tabel 5. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021
- Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021
- Tabel 6. Rekapitulasi perkara pidana Januari – Desember 2021
- Tabel 7. Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2021
- Tabel 8. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021
- Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2021
- Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2021
- Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2021
- Tabel 12. Keadaan perkara anak
- Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tabel 14. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak
- Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak
- Tabel 16. Mediasi tahun 2021
- Tabel 17. Upaya Hukum Banding Tahun 2021
- Tabel 18. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021
- Tabel 19. Upaya Hukum Peninjauan kembali Tahun 2021
- Tabel 20. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK
- Tabel 21. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani  
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021
- Tabel 22. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada POSBAKUM



Tabel 23. Perkara BHT yang di eksekusi

Tabel 24. Realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai DIPA 01

Tabel 25. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 01

Tabel 26. Realisasi penyerapan anggaran belanja modal DIPA 01

Tabel 27. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 03

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2018-2021
- Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2018-2021
- Grafik 2. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  
Tahun 2017-2021
- Grafik 3. Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu  
Tahun 2018-2021
- Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya  
Hukum banding tahun 2018-2021
- Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum  
Kasasi tahun 2018-2021
- Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum  
Peninjauan Kembali tahun 2018-2021
- Grafik 7. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum  
Tahun 2018-2021
- Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi  
Tahun 2018-2021
- Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat Yang puas terhadap  
Layanan peradilan Tahun 2018-2021
- Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima  
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2018-2021
- Grafik 11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima  
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2018-2021
- Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  
Tahun 2018 - 2021
- Grafik 13. Capaian persentase putusan perkara yang dimohonkan Banading,  
Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian  
Masyarakat



Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum

Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti

Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01 Tahun 2018 sd Tahun 2021

Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 Tahun 2018 sd Tahun 2021

Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01 Tahun 2018 sd Tahun 2021

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2018 sd Tahun 2021





# BABI PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara / Pemerintah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI Pasca Amandemen).

### **1. TUGAS POKOK**

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana ( pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum ).



## 2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf- staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

## C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2021 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



## **Pengantar**

### **Ikhtisar Eksekutif .**

**BAB I** Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian..

**BAB II** Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2021 dan perjanjian kerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) tahun 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim.

**BAB III** Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- c. Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV** Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

**Lampiran**, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2024
5. Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “***

##### **b. Misi :**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | INDIKATOR KINERJA                                               | Penjelasan                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, Dan akuntabel. | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan                 | Persentase perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan    |
|    |                                                                     | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan                  | Persentase perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan      |
|    |                                                                     | 3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu     | Persentase perbandingan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang ada                 |
|    |                                                                     | 4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada                   |
|    |                                                                     | 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara |
|    |                                                                     | 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan Perkara  |



|    |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)                                        | Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara                                                      |
|    |                                                           | 8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                                                     | Persentase perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak                                                                      |
|    |                                                           | 9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan                                                               | Persentase Index kepuasan pencari keadilan                                                                                                                                          |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu                                    | Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang Diputus                                               |
|    |                                                           | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu                                     | Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang Diputus                                                |
|    |                                                           | 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                                                | Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi                                                               |
|    |                                                           | 4. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu                          | Persentase perbandingan jumlah berkas yang diajukan banding dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK                                      |
|    |                                                           | 5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah | Persentase perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di putus. |





|    |                                                                       | Diputus                                                                     |                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Meningkatnya Akses peradilan Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum | Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan Tertentu |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)      | Persentase perbandingan jumlah perkara yang telah di eksekusi dengan jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan eksekusi.                                  |

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Adapun rencana kinerja tahun 2021 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                         | TARGET (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan                                 | 100        |
|    |                                                                     | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan                                  | 100        |
|    |                                                                     | 3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu                     | 100        |
|    |                                                                     | 4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu                      | 100        |
|    |                                                                     | 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding                 | 100        |
|    |                                                                     | 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi                  | 100        |
|    |                                                                     | 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 100        |



|    |                                                                       |                                                                                                                                |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                       | 8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                                                             | 10  |
|    |                                                                       | 9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan                                                                       | 100 |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.             | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu                                            | 100 |
|    |                                                                       | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu                                             | 100 |
|    |                                                                       | 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                                                        | 10  |
|    |                                                                       | 4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu                                   | 100 |
|    |                                                                       | 5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100 |
| 3  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum                                                    | 100 |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)                                                         | 80  |

#### D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

**Penetapan Kinerja Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                      | TARGET (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan                                              | 100        |
|    |                                                                     | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan                                               | 100        |
|    |                                                                     | 3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu                                   | 100        |
|    |                                                                     | 4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepatwaktu                                    | 100        |
|    |                                                                     | 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding                               | 100        |
|    |                                                                     | 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumKasasi                                | 100        |
|    |                                                                     | 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali(PK)               | 100        |
|    |                                                                     | 8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                           | 10         |
|    |                                                                     | 9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan                                     | 100        |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.           | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu          | 100        |
|    |                                                                     | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu           | 100        |
|    |                                                                     | 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                      | 10         |
|    |                                                                     | 4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu | 100        |
|    |                                                                     | 5. Persentase putusan perkara menarik                                                        | 100        |



|    |                                                                       |                                                                                          |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                       | perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus |     |
| 3  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan | 1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum              | 100 |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)                   | 80  |

Program :

- |           |                                                                   |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | Pembinaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 5.234.571.000,- |
| <b>2.</b> | Peningkatan sarana dan prasarana aparaturMA                       | Rp 65.000.000,-     |
| <b>3.</b> | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                              | Rp325.693.000,-     |



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian target masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

#### **A.1 perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian



indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

**Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan            | 100        | 100           | 100         |
|    |                                                                     | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan             | 100        | 100           | 100         |
|    |                                                                     | 3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu | 100        | 100           | 100         |
|    |                                                                     | 4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepatwaktu  | 100        | 100           | 100         |



|  |  |                                                                                 |     |       |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|  |  | 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding                 | 100 | 97,25 | 97,25 |
|  |  | 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi                  | 100 | 98,08 | 98,08 |
|  |  | 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 100 | 99,76 | 99,76 |
|  |  | 8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi              | 10  | 12,12 | 121.2 |
|  |  | 9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan                        | 100 | 98,96 | 98,96 |



|    |                                                           |                                                                                              |     |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu          | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                           | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu           | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                           | 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                      | 10  | 0   | 0   |
|    |                                                           | 4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                           | 5. Persentase putusan perkara menarik                                                        | 100 | 100 | 100 |





|    |                                                                       |                                                                                          |     |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                       | perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus |     |     |     |
| 3  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum              | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)                   | 80  | 0   | 0   |

Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan



target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraaan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali
8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:



**Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel**

| No. | Indikator Kinerja                                                       | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                         | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan:                      | 100 %     | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100 %    | 100 %    |
| b.  | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :                      | 100%      | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100 %    | 100 %    |
| c.. | Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu                | 99,46%%   | 39,39 %  | 100 %    | 100 %    | 99,46 %  | 39,39 %  | 100 %    |
| d.  | Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu                 | 100%      | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100 %    | 100 %    |
| e.  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding            | 93,23%    | 93,42 %  | 97,25%   | 100 %    | 93,23 %  | 93,42 %  | 97,25%   |
| f.  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi             | 96,68 %   | 96,26 %  | 98,08 %  | 100 %    | 96,68 %  | 96,26 %  | 98,08 %  |
| g.  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 92,10 %   | 99,55 %  | 99,76 %  | 100 %    | 92,10 %  | 99,55 %  | 99,76 %  |
| e.  | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi         | 20,83 %   | 2,5 %    | 12,12 %  | 10 %     | 416,6 %  | 25 %     | 121,2 %  |
| f.  | Index responden yang puas terhadap layanan peradilan                    | 92, 10 %  | 94,37 %  | 98,96 %  | 100 %    | 92,10 %  | 94,37 %  | 98,96 %  |

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                 | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                   | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Tabel keadaan sisa perkara perdata tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 per bulan**

| NO | JENIS Perkara | Jumlah perkara sisa tahun 2020 | Jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan di TAHUN 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |               |                                | JAN                                                             | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES |
| 1. | Gugatan       | 11                             | 2                                                               | 0   | 1   | 3   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|    | TOTAL         | 11                             | 2                                                               | 0   | 1   | 3   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2020 - 2021**

| Jenis perkara   | Sisa perkara Tahun 2019 | Sisa perkara tahun 2019 Yang diselesaikan tahun 2020 | Sisa perkara Tahun 2020 | Sisa perkara tahun 2020 Yang diselesaikan tahun 2021 |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Perdata gugatan | 11                      | 11                                                   | 11                      | 11                                                   |



Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 11 perkara, sisa perkara perdata ini dikarenakan perkara di daftarkan pada akhir tahun. Sisa perkara perdata tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 11 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara perdata tercapai seluruhnya sebesar 100 %.

#### **ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA:**

| Indikator Kinerja                                 | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                   | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase sisa perkara perdata yang Diselesaikan | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara perdata Tahun 2019-2021**





### Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kurun waktu tiga tahun (2019 - 2021) penyelesaian sisa perkara selalu 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda penyelesaian perkara. Pimpinan pengadilan di bantu panitera melakukan monitoring evaluasi perkara melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP), sehingga penyelesaian sisa perkara 2020 dapat di tuntaskan pada tahun 2021.

#### b. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                | Realisasi   |             |             | Target      | Capaian     |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 | Th.<br>2021 | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 |
| Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |



**Tabel 2. Keadaan sisa perkara pidana Tahun 2019- 2021**

| Jenis perkara | Sisa perkara Tahun 2019 | Sisa perkara tahun 2019 Yang diselesaikan tahun 2020 | Sisa perkara Tahun 2020 | Sisa perkara tahun 2020 Yang diselesaikan tahun 2021 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Pidana        | 69                      | 69                                                   | 70                      | 70                                                   |

**Tabel keadaan sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 per bulan**

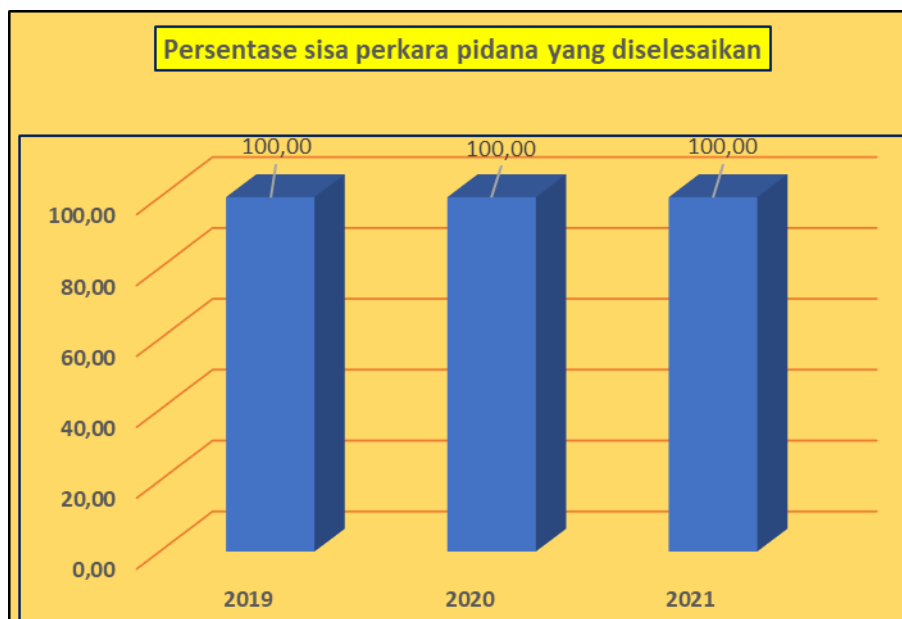
| NO | JENIS Perkara | Jumlah perkara sisa tahun 2020 | Jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan di bulan |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|    |               |                                | JAN                                                        | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1. | Pidana Biasa  | 70                             | 47                                                         | 22  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |
| 2. | Pidana Anak   | 0                              | 0                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |
|    | JUMLAH        | 70                             | 47                                                         | 22  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |

Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2020 sebanyak 70 perkara, yang terdiri dari pidana biasa sebanyak 70 perkara dan pidana anak 0 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%

**ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA:**

| Indikator Kinerja                                | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara pidana Tahun 2019-2021**



**Analisis dan evaluasi :**

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kurun waktu tiga tahun (2019 - 2021) penyelesaian sisa perkara selalu 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda sisa penyelesaian perkara. Pimpinan pengadilan di bantu panitera melakukan monitoring evaluasi perkara melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP), sehingga penyelesaian sisa perkara 2020 dapat di tuntaskan pada tahun 2021.

**c. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$





Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                        | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                          | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 99,46 %   | 39,39 %  | 100%     | 100%     | 99,46 %  | 39,39 %  | 100%     |

### **Penyelesaian Perkara Perdata**

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021. Sisa Tahun 2020 sebanyak 11 perkara dan masuk tahun 2021 sebanyak 28 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 39 perkara.

Dari total 39 perkara perdata, sebanyak 39 perkara telah diselesaikan (putus)

**Tabel 3. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020**

| Jenis Perkara   | Sisa 2020 | Masuk 2021 | Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan | Jumlah Perkara yang Diselesaikan (putus) | Sisa 2021   |
|-----------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| A               | B         | c          | (e = b+c)                              | F                                        | (g = e – f) |
| Perdata gugatan | 11        | 32         | 43                                     | 31                                       | 12          |



**Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2021**

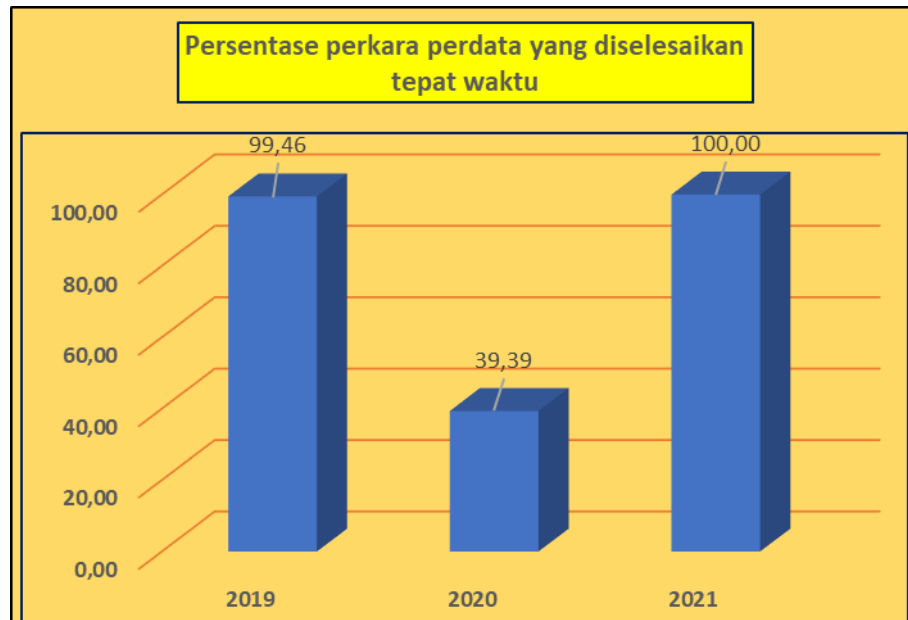
| BULAN     | PERKARA | Perkara yang diselesaikan/ putus | perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln) | Jumlah perkara yang selesai tepat waktu |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Januari   | Gugatan | 2                                | 2                                            | 2                                       |
| Februari  |         | 1                                | 1                                            | 1                                       |
| Maret     |         | 1                                | 1                                            | 1                                       |
| April     |         | 3                                | 3                                            | 3                                       |
| Mei       |         | 5                                | 5                                            | 5                                       |
| Juni      |         | 0                                | 0                                            | 0                                       |
| Juli      |         | 2                                | 2                                            | 2                                       |
| Agustus   |         | 1                                | 1                                            | 1                                       |
| September |         | 4                                | 4                                            | 4                                       |
| Oktober   |         | 4                                | 4                                            | 4                                       |
| November  |         | 8                                | 8                                            | 8                                       |
| Desember  |         | 0                                | 0                                            | 0                                       |
| TOTAL     |         | 31                               | 31                                           | 31                                      |

Selama tahun 2021 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 31 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 31 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                        | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                          | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 99,46 %.  | 39,39 %  | 100 %    | 100 %    | 99,46 %. | 39,39 %  | 100 %    |

**Grafik 3. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  
Tahun 2019-2021**



**Analisis dan evaluasi :**

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2019 - 2021) penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penyelesaian perkara perdata. Hal ini dikarenakan ada beberapa saksi dan tergugat di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan, selain itu juga adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilitas yang tertunda. Pada tahun 2021 seluruh perkara perdata dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan). Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.



**d. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                       | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100 %     | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    |

**Penyelesaian Perkara Pidana**

. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

**Tabel 6. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2021**

| BULAN    | PERKARA      | Perkara yang diselesaikan/ putus | Perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln) | Jumlah perkara yang selesai tepat waktu |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Januari  | Pidana Biasa | 49                               | 49                                           | 49                                      |
|          | Pidana Anak  | 2                                | 2                                            | 2                                       |
| Februari | Pidana biasa | 61                               | 61                                           | 61                                      |
|          | Pidana Anak  | 3                                | 3                                            | 3                                       |
| Maret    | Pidana Biasa | 52                               | 52                                           | 52                                      |
|          | Pidana Anak  | 1                                | 1                                            | 1                                       |
| April    | Pidana biasa | 65                               | 65                                           | 65                                      |
|          | Pidana Anak  | 3                                | 3                                            | 3                                       |
| Mei      | Pidana Biasa | 57                               | 57                                           | 57                                      |
|          | Pidana Anak  | 3                                | 3                                            | 3                                       |
| Juni     | Pidana biasa | 70                               | 70                                           | 70                                      |
|          | Pidana Anak  | 2                                | 2                                            | 2                                       |



|              |              |            |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Juli         | Pidana Biasa | 55         | 55         | 55         |
|              | Pidana Anak  | 0          | 0          | 0          |
| Agustus      | Pidana biasa | 78         | 78         | 78         |
|              | Pidana Anak  | 2          | 2          | 2          |
| September    | Pidana Biasa | 80         | 80         | 80         |
|              | Pidana Anak  | 2          | 2          | 2          |
| Oktober      | Pidana biasa | 47         | 47         | 47         |
|              | Pidana Anak  | 6          | 6          | 6          |
| November     | Pidana Biasa | 75         | 75         | 75         |
|              | Pidana Anak  | 5          | 5          | 5          |
| Desember     | Pidana biasa | 86         | 86         | 86         |
|              | Pidana Anak  | 1          | 1          | 1          |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>804</b> | <b>804</b> | <b>804</b> |

**Tabel 7. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021**

| Jenis Perkara | Sisa 2020 | Masuk 2021 | Jml Perkara yang harus diselesaikan | Jml Perkara yang telah Diselesaikan (putus) | Sisa Tahun 2021 |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Pidana Biasa  | 70        | 748        | 818                                 | 774                                         | 44              |
| Pidana Anak   | 0         | 33         | 33                                  | 30                                          | 3               |
| Jumlah        | <b>70</b> | <b>786</b> | <b>856</b>                          | <b>804</b>                                  | <b>47</b>       |

**Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021**

| Jenis Perkara | Jumlah perkara yang diselesaikan | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan) |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>      | <b>B</b>                         | <b>C</b>                                                           |
| Pidana Biasa  | 774                              | 774                                                                |
| Pidana Anak   | 30                               | 30                                                                 |
| Jumlah        | <b>804</b>                       | <b>804</b>                                                         |

Selama tahun 2021 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 804 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 804 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                       | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100 %     | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    |

**Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021**



**Analisis dan evaluasi :**

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri MuaraEnim.

2. Meskipun pada tahun 2021 terjadi pandemi covid-19, namun sidang tetap dilaksanakan secara online, hal ini dilaksanakan agar tidak menghambat proses hukum dari perkara pidana.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

Pada tahun 2021, pagu anggaran dalam DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk pelaksanaan minutasasi (penyelesaian perkara) pidana sebesar Rp 36.732.000,-, realisasi sebesar Rp 36.722.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp 10.000,-

**e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagaiberikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                            | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 93,23%    | 94,46 %  | 97,32%   | 100 %    | 93,23%   | 94,46 %  | 97,32%   |



**Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021**

| No  | Nomor Perkara PN            | Putusan PN | Permohonan Banding |
|-----|-----------------------------|------------|--------------------|
| 1.  | 578/Pid.B/2020/PN.Mre       | 20/01/2021 | 25/01/2021         |
| 2.  | 100/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 04/05/2021 | 07/05/2021         |
| 3.  | 200/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 31/05/2021 | 07/06/2021         |
| 4.  | 163/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 22/06/2021 | 28/06/2021         |
| 5.  | 261/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 06/07/2021 | 12/07/2021         |
| 6.  | 287/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 08/07/2021 | 14/07/2021         |
| 7.  | 432/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 14/09/2021 | 20/09/2021         |
| 8.  | 304/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 14/09/2021 | 21/09/2021         |
| 9.  | 479/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 21/09/2021 | 24/09/2021         |
| 10. | 517/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 12/10/2021 | 14/10/2021         |
| 11. | 571/Pid.B/2021/PN Mre       | 15/11/2021 | 17/11/2021         |
| 12. | 516/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 17/11/2021 | 23/11/2021         |
| 13. | 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre | 24/11/2021 | 29/11/2021         |
| 14. | 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre | 24/11/2021 | 29/11/2021         |

**Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021**

| No | Nomor Perkara PN     | Putusan PN | Permohonan Banding |
|----|----------------------|------------|--------------------|
| 1. | 14/Pdt.G/2020/PN Mre | 23/03/2021 | 06/04/2021         |
| 2. | 22/Pdt.G/2020/PN Mre | 05/04/2021 | 12/04/2021         |
| 3. | 31/Pdt.G/2020/PN Mre | 18/05/2021 | 25/05/2021         |
| 4. | 33/Pdt.G/2020/PN Mre | 28/05/2021 | 07/06/2021         |
| 5. | 3/Pdt.G/2021/PN Mre  | 09/07/2021 | 19/07/2021         |
| 6. | 1/Pdt.G/2021/PN Mre  | 27/07/2021 | 09/08/2021         |
| 7. | 6/Pdt.G/2021/PN Mre  | 30/08/2021 | 08/09/2021         |
| 8. | 11/Pdt.G/2021/PN Mre | 15/11/2021 | 25/11/2021         |
| 9. | 12/Pdt.G/2021/PN Mre | 28/10/2021 | 09/11/2021         |

**Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021**

| Jenis Perkara   | Jumlah perkara Putus | Jumlah Pengajuan Banding | Jumlah perkara yang tidak banding |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Perkara Perdata | 31                   | 9                        | 22                                |
| Perkara Pidana  | 804                  | 14                       | 790                               |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>835</b>           | <b>23</b>                | <b>812</b>                        |



### Upaya hukum banding

Pada tahun 2021 jumlah putusan adalah sebanyak 835 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 23 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 812 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 sebesar 97,25 % dan capaiannya sebesar 97,25 %

### Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

| Indikator Kinerja                                            | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 93,23%    | 94,46 %  | 97,25 %  | 100 %    | 93,23%   | 94,46 %  | 97,25 %  |

**Grafik 4. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding Tahun 2019-2021**



### Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian sebesar 2,79 % dari tahun sebelumnya.



Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

Pada tahun 2021, pagu anggaran dalam DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk pelaksanaan penanganan perkara banding pidana sebesar Rp 11.260.000,-, realisasi sebesar Rp 11.074.542,- dan sisa anggaran sebesar Rp 185.458,-

**f. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                           | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                             | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 96,68%    | 96,26%   | 97,83%   | 100%     | 96,68%   | 96,26%   | 97,83%   |



**Tabel 12. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan  
Upaya Hukum Kasasi tahun 2021**

| No | Nomor Perkara PN            | Putusan PN | Permohonan Kasasi |
|----|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1. | 602/Pid.Sus/2020/PN Mre     | 09/03/2021 | 10/03/2021        |
| 2. | 100/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 04/05/2021 | 01/07/2021        |
| 3. | 163/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 22/06/2021 | 13/08/2021        |
| 4. | 287/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 08/07/2021 | 14/09/2021        |
| 5. | 304/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 14/09/2021 | 10/11/2021        |
| 6. | 479/Pid.Sus/2021/PN Mre     | 21/09/2021 | 22/11/2021        |
| 7. | 491/Pid.B/2021/PN Mre       | 11/11/2021 | 17/11/2021        |
| 8. | 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre | 24/11/2021 | 29/12/2021        |
| 9. | 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre | 24/11/2021 | 17/12/2021        |

**Tabel 13. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan  
Upaya Hukum Kasasi tahun 2021**

| No | Nomor Perkara PN     | Putusan PN | Permohonan Kasasi |
|----|----------------------|------------|-------------------|
| 1. | 14/Pdt.G/2020/PN Mre | 23/03/2021 | 05/07/2021        |
| 2. | 22/Pdt.G/2020/PN Mre | 05/04/2021 | 05/07/2021        |
| 3. | 31/Pdt.G/2020/PN Mre | 18/05/2021 | 10/08/2021        |
| 4. | 33/Pdt.G/2020/PN Mre | 28/05/2021 | 12/08/2021        |
| 5. | 1/Pdt.G/2021/PN Mre  | 27/07/2021 | 22/10/2021        |
| 6. | 3/Pdt.G/2021/PN Mre  | 09/07/2021 | 08/11/2021        |
| 7. | 6/Pdt.G/2021/PN Mre  | 30/08/2021 | 20/12/2021        |

**Tabel 14. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan  
upaya hukum Kasasi tahun 2021**

| Jenis Perkara   | Jumlah perkara Putus | Jumlah Pengajuan Kasasi | Jumlah perkara yang tidak Kasasi |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Perkara Perdata | 31                   | 7                       | 24                               |
| Perkara Pidana  | 804                  | 9                       | 795                              |
| JUMLAH          | 835                  | 16                      | 819                              |



## Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2021 jumlah putusan adalah sebanyak 835 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 16 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 819 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 sebesar 98,08 % dan capaiannya sebesar 98,08 %

### Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

| Indikator Kinerja                                           | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                             | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 96,68%    | 96,26%   | 98,08 %  | 100%     | 96,68%   | 96,26%   | 98,08 %  |

**Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi Tahun 2019-2021**





### Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian sebesar 1,82 % dari tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

Pada tahun 2021, pagu anggaran dalam DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk pelaksanaan penanganan perkara kasasi dan PK pidana sebesar Rp 5.400.000,-, realisasi sebesar Rp 5.226.380,- dan sisa anggaran sebesar Rp 173.620,-

#### g. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                       | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 99,34 %   | 99,55 %  | 99,76%   | 100%     | 99,34 %  | 99,55 %  | 99,76%   |



**Tabel 15. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tahun 2021**

| No | Nomor Perkara PN      | Putusan PN | Permohonan PK |
|----|-----------------------|------------|---------------|
| 1. | 380/Pid.B/2020/PN Mre | 25/11/2020 | 31/08/2021    |

**Tabel 16. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2021**

| No | Nomor Perkara PN     | Putusan PN | Permohonan PK |
|----|----------------------|------------|---------------|
| 1. | 23/Pdt.G/2016/PN Mre | 19/06/2017 | 13/08/2021    |

**Tabel 17. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2021**

| Jenis Perkara   | Jumlah perkara Putus | Jumlah Pengajuan PK | Jumlah perkara yang tidak PK |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Perkara Perdata | 31                   | 1                   | 30                           |
| Perkara Pidana  | 804                  | 1                   | 803                          |
| JUMLAH          | 835                  | 2                   | 833                          |

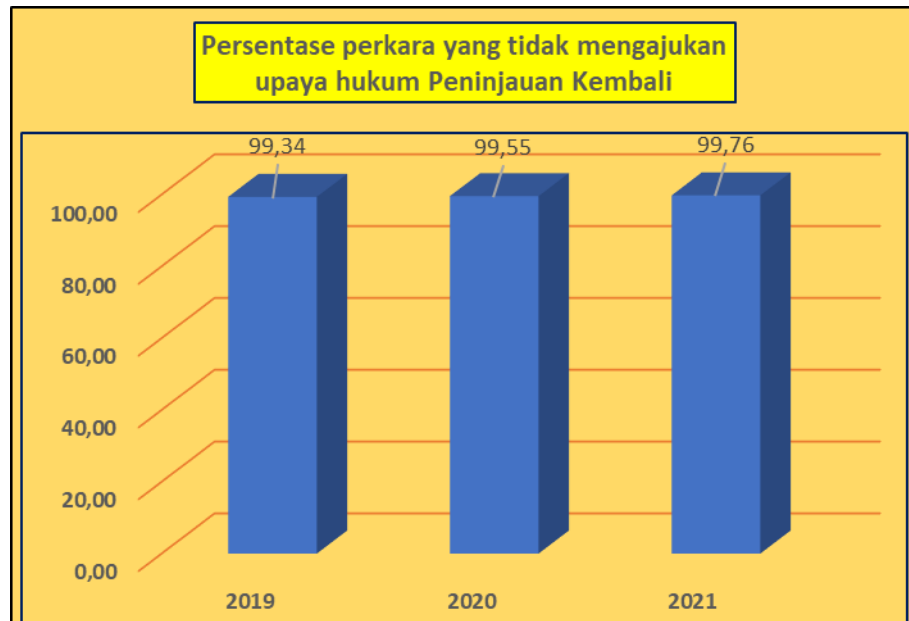
### Upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada tahun 2021 jumlah putusan adalah sebanyak 835 putusan. Sedangkan putusan diajukan PK sebanyak 2 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 833 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2021 sebesar 99,76% dan capaiannya sebesar 99,76%

### Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

| Indikator Kinerja                                       | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 99,34 %   | 99,55 %  | 99,76%   | 100%     | 99,34 %  | 99,55 %  | 99,76%   |

**Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum PK Tahun 2019-2021**



#### **Analisis dan evaluasi :**

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian sebesar 0,21 % dari tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

Pada tahun 2021, pagu anggaran dalam DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk pelaksanaan penanganan perkara kasasi dan PK pidana sebesar Rp 5.400.000,-, realisasi sebesar Rp 5.226.380,- dan sisa anggaran sebesar Rp 173.620,-

#### **Rata-rata capaian upaya hukum keseluruhan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Enim secara keseluruhan pada tahun 2021, meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali. Rata-rata capaian penyelesaian perkara perdata dan pidana selama tahun 2021 adalah sebesar 96,76%.



| Indikator Kinerja                                      | Realisasi | Target   | Capaian  | Capaian rata-rata |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
|                                                        | Th. 2021  | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2021          |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : |           |          |          |                   |
| - Banding                                              | 97,25 %   | 100%     | 97,25 %  | 98,36 %           |
| - Kasasi                                               | 98,08 %   |          | 98,08 %  |                   |
| - PK                                                   | 99,76%    |          | 99,76%   |                   |

**Analisis dan evaluasi rata-rata capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                    | Target   | Capaian rata-rata |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|
|                                                      | Th. 2021 | Th. 2019          | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | 100%     | 98,42 %           | 96,41 %  | 98,36 %  |

**Grafik 7. Capaian rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Tahun 2019-2021**







Secara umum, rata-rata capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) selama tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sudah baik. Ini berarti tingginya penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2021 dan puas dengan putusan hakim.

#### **h. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                               | Realisasi   |             |             | Target      | Capaian     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                 | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 | Th.<br>2021 | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 20,83 %     | 2,5 %       | 15,2%       | 10%         | 20,83 %     | 25 %        | 152%        |

Pada tahun 2021, perkara anak yang masuk berjumlah 33 perkara. Jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi pada tabel berikut:



**Tabel 18. Keadaan Perkara Anak Tahun 2021**

| NO | JENIS Perkara | Jumlah perkara pidana anak yang masuk pada bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |               | JAN                                              | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES |
| 1. | Pidana Anak   | 2                                                | 4   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 6   | 5   | 3   |
|    | TOTAL         | 33                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Tabel 19. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2021**

| No | Perkara yang berhasil Diversi | Tanggal Kesepakatan Diversi | Hakim Fasilitator Diversi            |
|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre   | 10 Mei. 2021                | Sera Ricky Swanri S, SH              |
| 2  | 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre   | 07 Okt. 2021                | Hartati, SH                          |
| 3  | 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre   | 04 Nov. 2021                | Hartati, SH                          |
| 4  | 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre   | 15 Nov. 2021                | Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH, MH |

Pada tahun 2021, jumlah perkara pidana anak yang masuk sebanyak 33 perkara. Dari jumlah tersebut, ada 4 perkara yang berhasil dilaksanakan diversi oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Muara Enim. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi sebesar 12,12 %, dan capaian di dapat sebesar 121,2 %.

**Analisis dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                               | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                 | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 20,83 %   | 2,5 %    | 12,12 %  | 10%      | 20,83 %  | 25 %     | 121,2 %  |

**Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan  
Dengan Diversi Tahun 2019-2021**



#### **Analisis dan evaluasi :**

Pada tahun 2021 dari 10 % perkara anak ditargetkan selesai dengan diversi. Realisasi didapat sebesar 12,12 % yang berarti realisasi telah melebihi target dan terjadi peningkatan realisasi sebesar 9,7 % dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2021 sebesar 121,2 % dan terjadi peningkatan capaian sebesar 96,2 % dari tahun sebelumnya.

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.



Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.

**i. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 92.10%    | 94,37 %  | 98,96%   | 100%     | 92.10%   | 94,37 %  | 98,96%   |

Pada tahun 2021, survey dilakukan sebanyak tiga periode, yaitu periode Januari sd Juni 2021, periode Juli sd September 2021 dan periode Oktober sd Desember 2021. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau



angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

**Kategori Mutu Pelayanan**

| No. | Mutu Pelayanan  | Norma Skor     |             |
|-----|-----------------|----------------|-------------|
|     |                 | Skala 100      | Skala 1-4   |
| 1.  | A (Sangat Baik) | 81,26 – 100,00 | 3,26 – 4,00 |
| 2.  | B (Baik)        | 62,51 – 81,25  | 2,51 – 3,25 |
| 3.  | C (Kurang Baik) | 43,76 – 62,50  | 1,76 – 2,50 |
| 4.  | D (Tidak Baik)  | 25,00 – 43,75  | 1,00 – 1,75 |

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20. Index Kepuasan Masyarakat**

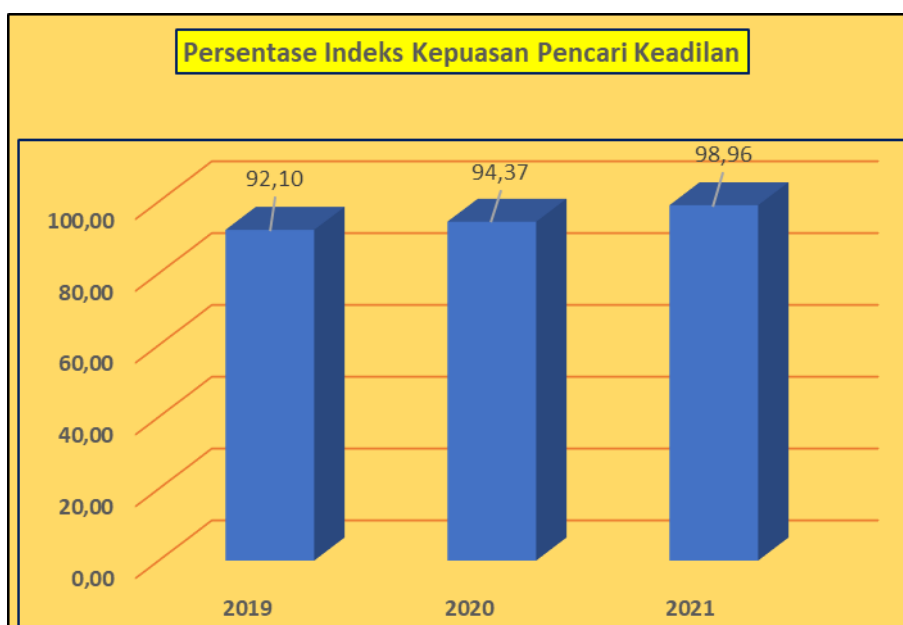
| Periode                                                | Jumlah responden | Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100) | Kategori Mutu Pelayanan |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Januari – Juni 2020                                    | 150 orang        | 96,42%                                       | Sangat Baik             |
| Juli – Desember 2020                                   | 150 orang        | 94,37%                                       | Sangat Baik             |
| <b>Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2020</b> |                  | <b>94,50%</b>                                | <b>Sangat Baik</b>      |
| Januari – Juni 2021                                    | 150 orang        | 99,08%                                       | Sangat Baik             |
| Juli – September 2021                                  | 150 orang        | 95,77%                                       | Sangat Baik             |
| Oktober - Desember 2021                                | 150 orang        | 98,96 %                                      | Sangat Baik             |
| <b>Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2021</b> |                  | <b>97,93 %</b>                               | <b>Sangat Baik</b>      |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 98,96 % dan capaian 98,96 %. Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

| No  | Ruang Lingkup                          | Nilai Rata-rata |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| U1. | Persyaratan                            | 3,9             |
| U2. | Prosedur                               | 3,88            |
| U3. | Waktu Pelayanan                        | 3,84            |
| U4. | Biaya / Tarif                          | 3,03            |
| U5. | Produk layanan                         | 3,88            |
| U6. | Kompetensi Pelaksana                   | 3,93            |
| U7. | Perilaku Pelaksana                     | 3,93            |
| U8. | Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan | 3,92            |
| U9. | Sarana dan Prasarana                   | 4,04            |

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

**Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat Yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019-2021**



**Analisis dan evaluasi :**

Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 98,96 %, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan kenyamanan dengan peningkatan sarana prasarana, menjaga keamanan dan kebersihan, peningkatan pelayanan prima oleh petugas PTSP, memberikan kompensasi jika pelayanan tidak memuaskan, dan berkomitmen tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta tidak menerima pungutan liar dalam bentuk apapun.

**SASARAN2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:



### Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                   | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                             | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100 %    | 100%     |
| b.  | Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                              | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100 %    | 100%     |
| c.  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                                                              | 5,71 %    | 3,03 %   | 0%       | 10%      | 57,1 %   | 30,3 %   | 0%       |
| d.  | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                     | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100 %    | 100%     |
| e.  | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100 %    | 100%     |

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:





| Indikator Kinerja                                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Tabel 21. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak**

| BULAN     | PERKARA | Perkara yang diselesaikan/ putus | Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu |
|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Januari   | Gugatan | 2                                | 2                                                                 |
| Februari  |         | 1                                | 1                                                                 |
| Maret     |         | 1                                | 1                                                                 |
| April     |         | 3                                | 3                                                                 |
| Mei       |         | 5                                | 5                                                                 |
| Juni      |         | 0                                | 0                                                                 |
| Juli      |         | 2                                | 2                                                                 |
| Agustus   |         | 1                                | 1                                                                 |
| September |         | 4                                | 4                                                                 |
| Oktober   |         | 4                                | 4                                                                 |
| November  |         | 8                                | 8                                                                 |
| Desember  |         | 0                                | 0                                                                 |
| TOTAL     |         | 31                               | 31                                                                |

| BULAN     | PERKARA    | Perkara yang diselesaikan/ putus | Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu |
|-----------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Januari   | Permohonan | 4                                | 4                                                                 |
| Februari  |            | 2                                | 2                                                                 |
| Maret     |            | 0                                | 0                                                                 |
| April     |            | 3                                | 3                                                                 |
| Mei       |            | 0                                | 0                                                                 |
| Juni      |            | 0                                | 0                                                                 |
| Juli      |            | 0                                | 0                                                                 |
| Agustus   |            | 1                                | 1                                                                 |
| September |            | 2                                | 2                                                                 |
| Oktober   |            | 1                                | 1                                                                 |
| November  |            | 2                                | 2                                                                 |
| Desember  |            | 0                                | 0                                                                 |
| TOTAL     |            | 15                               | 15                                                                |



| Jenis Perkara | Tahun | Jumlah Putusan | Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu |
|---------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Perdata       | 2019  | 17             | 17                                                                |
|               | 2020  | 98             | 98                                                                |
|               | 2021  | 46             | 46                                                                |

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 46 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 46 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, dan capaiannya sebesar 100 %.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                                                    | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                      | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepadapara pihak tepat waktu | 100%      | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019-2021**





### Analisis dan evaluasi :

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas ) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pada tahun pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2021 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

#### b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                                                    | Realisasi   |             |             | Target      | Capaian     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                      | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 | Th.<br>2021 | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 |
| Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |



| BULAN        | PERKARA      | Perkara yang diselesaikan/ putus | Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Januari      | Pidana Biasa | 49                               | 49                                                                |
|              | Pidana Anak  | 2                                | 2                                                                 |
| Februari     | Pidana biasa | 61                               | 61                                                                |
|              | Pidana Anak  | 3                                | 3                                                                 |
| Maret        | Pidana Biasa | 52                               | 52                                                                |
|              | Pidana Anak  | 1                                | 1                                                                 |
| April        | Pidana biasa | 65                               | 65                                                                |
|              | Pidana Anak  | 3                                | 3                                                                 |
| Mei          | Pidana Biasa | 57                               | 57                                                                |
|              | Pidana Anak  | 3                                | 3                                                                 |
| Juni         | Pidana biasa | 70                               | 70                                                                |
|              | Pidana Anak  | 2                                | 2                                                                 |
| Juli         | Pidana Biasa | 55                               | 55                                                                |
|              | Pidana Anak  | 0                                | 0                                                                 |
| Agustus      | Pidana biasa | 78                               | 78                                                                |
|              | Pidana Anak  | 2                                | 2                                                                 |
| September    | Pidana Biasa | 80                               | 80                                                                |
|              | Pidana Anak  | 2                                | 2                                                                 |
| Oktober      | Pidana biasa | 47                               | 47                                                                |
|              | Pidana Anak  | 6                                | 6                                                                 |
| November     | Pidana Biasa | 75                               | 75                                                                |
|              | Pidana Anak  | 5                                | 5                                                                 |
| Desember     | Pidana biasa | 86                               | 86                                                                |
|              | Pidana Anak  | 1                                | 1                                                                 |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>804</b>                       | <b>804</b>                                                        |

**Tabel 21. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak**

| Jenis Perkara | Tahun | Jumlah Putusan | Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak ( terdakwa ) Tepat Waktu |
|---------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pidana        | 2019  | 602            | 602                                                                            |
|               | 2020  | 676            | 676                                                                            |
|               | 2021  | 804            | 804                                                                            |

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 804 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 804 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| . Indikator Kinerja                                                                 | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                     | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepadapara pihak tepat waktu | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Pada tahun pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2021 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara pidana yang putus di tahun 2021 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

Pada tahun 2021, pagu anggaran dalam DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk pelaksanaan penanganan perkara kasasi dan PK pidana sebesar Rp 21.530.000,-, realisasi sebesar Rp 21.503.403,- dan sisa anggaran sebesar Rp 26.597,-

**Grafik 11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim Kepada para pihak tepat waktu Tahun 2019-2021**





c. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut:

| Indikator Kinerja                                    | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                      | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5,71 %    | 3,03 %   | 0%       | 10%      | 57,1 %   | 30,3 %   | 0%       |

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 32 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 0 perkara.

Tabel 22. Mediasi tahun 2021

| Jenis Perkara   | Jumlah perkara yang diajukan Mediasi | Penyelesaian Mediasi |       |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------|
|                 |                                      | Akta Damai           | Gagal |
| Perdata Gugatan | 32                                   | 0                    | 32    |



Tidak adanya perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dikarenakan :

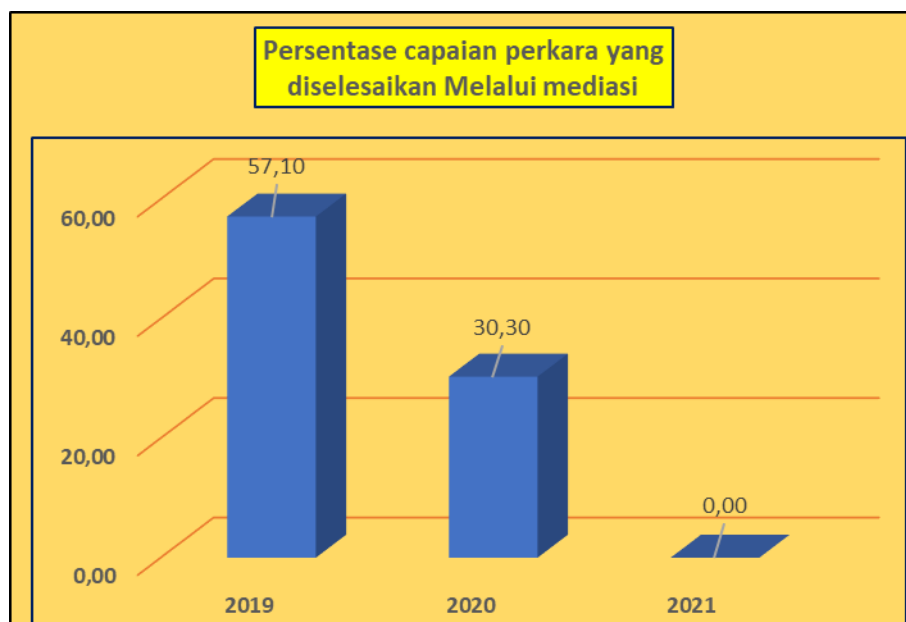
1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 0 %, dan capaiannya di peroleh sebesar 0 %.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                    | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                      | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5,71 %    | 3,03 %   | 0 %      | 10%      | 57,1 %   | 30,3 %   | 0%       |

**Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan Melalui mediasi Tahun 2019- 2021**





Pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 5,71 %, tahun 2020 sebesar 3,03% dan pada tahun 2021 sebesar 0 % dengan tidak ada perkara yang berhasil di mediasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.

**d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari A dan B) dengan jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 0 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                                                                              | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |





### d.1 Pengiriman berkas perkara banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2021 adalah sebanyak 24 perkara, yang terdiri dari berkas banding pidana sebanyak 14 perkara dan berkas banding perdata sebanyak 14 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**Tabel 23. Upaya Hukum Banding Tahun 2021**

| Jenis Perkara | Perkara banding 2021 | Pengiriman banding secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 | Sisa banding 2021 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pidana        | 14                   | 14                                                           | 0                 |
| Perdata       | 10                   | 10                                                           | 0                 |
| Jumlah        | <b>24</b>            | <b>24</b>                                                    | <b>0</b>          |

### d.2 Pengiriman berkas perkara Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2021 adalah sebanyak 16 perkara, yang terdiri dari berkas kasasi pidana sebanyak 9 perkara dan berkas kasasi perdata sebanyak 7 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**Tabel 24. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021**

| Jenis Perkara | Perkara Kasasi 2021 | Pengiriman Kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 | Sisa kasasi 2021 |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Pidana        | 9                   | 9                                                           | 0                |
| Perdata       | 7                   | 7                                                           | 0                |
| Jumlah        | <b>16</b>           | <b>16</b>                                                   | <b>0</b>         |

### d.3 Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2021 adalah sebanyak 2 perkara, yang keseluruhannya terdiri dari berkas PK perdata sebanyak 1 perkara dan pidana 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



**Tabel 25. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021**

| Jenis Perkara | Perkara Kasasi 2021 | Pengiriman Kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 | Sisa kasasi 2021 |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Pidana        | 1                   | 1                                                           | 0                |
| Perdata       | 1                   | 1                                                           | 0                |
| Jumlah        | 2                   | 2                                                           | 0                |

**d.4 Pengiriman berkas perkara secara keseluruhan**

**Tabel 26. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK**

| Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK |        | Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu |        |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Perdata                                              | Pidana | Perdata                                                                                       | Pidana |
| 18                                                   | 24     | 18                                                                                            | 24     |
| Total = 42                                           |        | Total = 42                                                                                    |        |

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK selama tahun 2021 adalah sebanyak 42 perkara dan telah dikirim tepat waktu. Tidak ada berkas yang dikembalikan lagi karena tidak lengkap. Sehingga realisasi pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dengan lengkap dan tepat waktu adalah 100%, dan capaian di dapat 100%.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

**Grafik 13. Capaian persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**





Pada tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2021 capaian 100 %. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali di tahun 2021 telah dikirim dengan lengkap dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Monitoring Impelementasi SIPP serta pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana dan Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama sudah berjalan dengan baik.

**e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara menarik perhatian yang di akses online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja                                                                                                                  | Realisasi   |             |             | Target      | Capaian     |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                    | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 | Th.<br>2021 | Th.<br>2019 | Th.<br>2020 | Th.<br>2021 |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |



Selama tahun 2021, ada 1 perkara pidana yang menarik perhatian masyarakat yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu perkara Nomor : 602/Pid.Sus/2020/PNMre, yang diputus pada tanggal 9 Maret 2021 dan putusannya juga telah di upload pada tanggal 9 Maret 2021. Semua perkara tersebut dalam waktu 1 hari setelah putus, putusannya dapat di akses secara online dalam website <http://sipp.pn-muaraenim.go.id/> oleh masyarakat.

**Tabel 27. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani  
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021**

| Tahun | Jumlah Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat | Jumlah Putusan Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat yang di Upload Di website |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019  | 3                                                       | 3                                                                                         |
| 2020  | 1                                                       | 1                                                                                         |
| 2021  | 1                                                       | 1                                                                                         |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                                                                                                  | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                    | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik Perhatian masyarakat**



Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100%. Artinya pada tahun 2021, seluruh perkara yang menarik perhatian masyarakat, baik perkara maupun putusannya dapat di akses oleh masyarakat secara online.

**SASARAN3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:



**Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

| No. | Indikator Kinerja                                                                            | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                              | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

Analisa terhadap pencapaian target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                                        | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                          | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |



Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 19 orang dan semuanya terlayani.

**Tabel 28. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum**

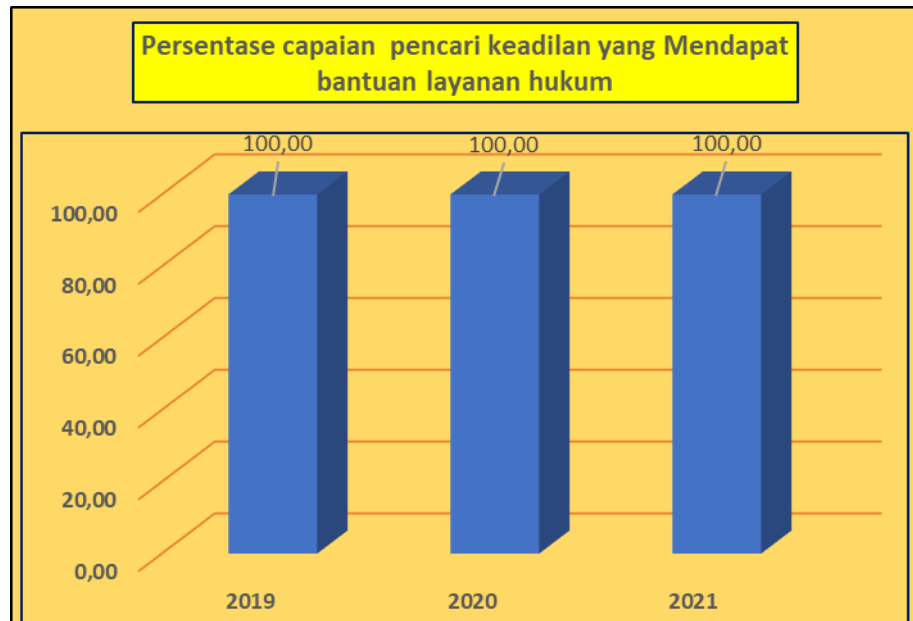
| Tahun | Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum | Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2019  | 180                                                               | 180                                                                |
| 2020  | 20                                                                | 20                                                                 |
| 2021  | 19                                                                | 19                                                                 |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                                        | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                          | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |

**Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum**



Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100%. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Muara Enim dengan PERADI, dan pengacara PERADI yang bertugas di Posbakum juga telah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pencari keadilan yang datang ke Posbakum, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas manusia.

Pada tahun 2021, anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk layanan bantuan hukum pada POSBAKUM sebesar Rp 38.400.000,-, realisasi sebesar Rp 38.400.000,-, dan sisa anggarana Rp 0,-

#### **SASARAN 4: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :





1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Sasaran IV: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 14,3%     | 33,33 %  | 100%     | 80%      | 14,3 %   | 41,66 %  | 125%     |

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Prosentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindak lanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 14,3%     | 33,33 %  | 0%       | 80%      | 14,3 %   | 41,66 %  | 0%       |



Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekusi sebanyak 2 perkara. Dan jumlah putusan perkara perdata BHT yang telah di tindak lanjuti (di eksekusi) sebanyak 0 perkara, hal ini dikarenakan perkara yang mendaftar untuk di eksekusi, pada tahun 2021 masih dalam proses teguran / Aanmaning.

**Tabel 29. perkara BHT yang di eksekusi**

| Tahun | Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk di ditindak lanjuti (eksekusi) | Jumlah Putusan Perkara BHT yang Ditindak Lanjuti (Di eksekusi) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2019  | 7                                                                                         | 1                                                              |
| 2020  | 3                                                                                         | 1                                                              |
| 2021  | 2                                                                                         | 0                                                              |

**Tabel 30. Perkara BHT yang di tindaklanjuti Untuk di eksekusi**

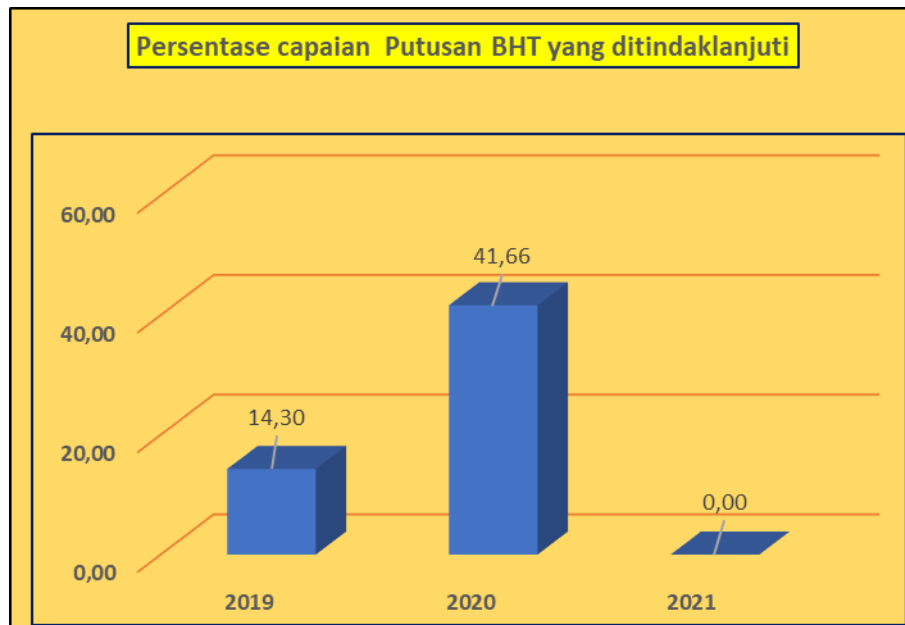
| Nomor Perkara                                 | Tanggal Permohonan Eksekusi | Proses (tindak lanjut) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2/Pdt.Eks/2021/PN Mre jo 38/Pdt.G/1999/PN ME  | 22 Juni 2021                | Teguran/<br>Aanmaning  |
| 1/Pdt.Eks/2021/PN Mre jo 12/Pdt.G/2018/PN Mre | 31 Maret 2021               | Teguran/<br>Aanmaning  |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0 %, dan capaian 0%

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:**

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 14,3 %    | 33,33 %  | 0%       | 80%      | 14,3 %   | 41,66 %  | 0 %      |

**Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti**



Pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 14,30%, pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 41,66 %. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 0 % yang artinya terjadi penurunan. Hasil capaian ini tidak memenuhi target kinerja yang diinginkan. Hal ini dikarenakan perkara yang memohon untuk di eksekusi masih dalam proses Aanmaning.

#### A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut :

##### 1. Sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

| No. | Indikator Kinerja                                        | Realisasi |          |          | Target | Capaian  |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |                                                          | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 |        | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan:       | 100 %     | 100 %    | 100 %    | 100 %  | 100 %    | 100%     | 100 %    |
| b.  | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :       | 100 %     | 100%     | 100 %    | 100 %  | 100 %    | 100%     | 100 %    |
| c.. | Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu | 99,46 %   | 39,39 %  | 100%     | 100%   | 99,46 %  | 39,39 %  | 100%     |



|    |                                                                         |          |         |        |       |         |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| d. | Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu                 | 100%     | 100%    | 100 %  | 100 % | 100%    | 100%    | 100 %  |
| e. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding            | 93,23%   | 94,46%  | 97,25% | 100%  | 93,23%  | 94,46%  | 97,25% |
| f. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi             | 96,68 %  | 96,26 % | 98,08% | 100%  | 96,68 % | 96,26 % | 98,08% |
| g. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 93,34 %  | 99,55 % | 99,76% | 100%  | 93,34 % | 99,55 % | 99,76% |
| e. | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi         | 20,83 %  | 2,5 %   | 12,12% | 10%   | 20,83 % | 25 %    | 121,2% |
| f. | Index responden yang puas terhadap layanan peradilan                    | 92, 10 % | 94,37 % | 98,96% | 100%  | 92,10 % | 94,37 % | 98,96% |

## 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                   | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                             | 100%      | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100%     | 100 %    |
| b.  | Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                              | 100 %     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| c.  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                                                              | 5,71%     | 3,03 %   | 0%       | 10%      | 57,1 %   | 30,3 %   | 0%       |
| d.  | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                     | 100%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| e.  | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus | 100%      | 100%     | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100%     | 100 %    |



**3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

| No. | Indikator Kinerja                                                                            | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                              | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| a.  | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100%      | 100%     | 100 %    | 100 %    | 100%     | 100%     | 100 %    |

**4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi |          |          | Target   | Capaian  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | Th. 2019  | Th. 2020 | Th. 2021 | Th. 2021 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 14,3 %    | 33,33 %  | 0%       | 80%      | 14,3 %   | 41,66 %  | 0%       |

**A.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2015-2020**

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2020 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah menyusun Rencana Strategis 2015-2020 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam renstra 2015-2020 Pengadilan Negeri Muara Enim telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2021 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2020 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut:



| NO | Tujuan                                                                                                                     | Indikator Tujuan                                                    | Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja Utama                                      | TARGET JANGKA MENENGAH (%) | TARGET 2021 (%) | REALISASI 2021 (%) | CAPAIAN 2021 (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. | Persentase perkara perdata yang diselesaikan                 | 80                         | 100             | 100                | 100              |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase Perkara pidana yang diselesaikan                  | 80                         | 100             | 100                | 100              |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu     | 80                         | 100             | 100                | 100              |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | 80                         | 100             | 100                | 100              |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 80                         | 100             | 97,25              | 97,25            |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | 80                         | 100             | 98,08              | 98,08            |
|    |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     | Persentase                                                   | 80                         | 100             | 99,76              | 99,76            |



|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           |                                                                                  |    |     |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|
|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           | perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)                |    |     |       |       |
|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                  | 80 | 10  | 12,12 | 121,2 |
|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           | Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan                            | 80 | 100 | 98,96 | 98,96 |
| 2. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i> | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat Waktu | 90 | 100 | 100   | 100   |
|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           | Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang Dikirim Kepada pihak tepat Waktu  | 90 | 100 | 100   | 100   |
|    |                                                                                                     |                                                  |                                                           | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui                                     | 90 | 10  | 0     | 0     |



|    |                                                                                |                                                                      |                                                                       |                                                                                                                             |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                                                |                                                                      |                                                                       | mediasi                                                                                                                     |     |     |     |     |
|    |                                                                                |                                                                      |                                                                       | Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu                                   | 90  | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                |                                                                      |                                                                       | Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 90  | 100 | 100 | 100 |
| 3  | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum                  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum                                                    | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan                   | Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)                                                      | 80  | 80  | 0   | 0   |





Dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2021 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir rencana program jangka menengah yang berakhir pada tahun 2021 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Muara Enim telah memuaskan. Realisasi hampir keseluruhan telah melampaui target jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024. Ada 2 indikator yang belum tercapai target yaitu : indiktaor kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi dan indikator kerja putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti.

#### **A.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2021 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2021 pada beberapa target di karenakan :

- a. Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib.
- b. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara
- c. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkara minutasi.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indiktaor kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang diajukan mediasi tidak berhasil mengeluarkan akta damai. Karena para pihak yang berperkara saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri dan bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.
- b. Indikator kkerja untuk putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti (di eksekusi) belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra, dikarenakan pada tahun 2021 perkara yang mendaftar untuk permohonan eksekusi belum sampai pada tahap eksekusi, masih pada tahap Aamaning.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

#### **A.5 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Anggaran.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 5,147,614,000,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 325,693,000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Sumber Daya Anggaran / dana ini telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan di kantor, sehingga target yang diinginkan sesuai dengan visi misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pada tahun 2021 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 34 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) sebanyak 10 orang
2. Tenaga kepaniteraan:
  - ✓ Panitera : 1 orang
  - ✓ Panitera Muda : 3 orang
  - ✓ Panitera Pengganti : 10 Orang
  - ✓ Jurusita : 1 orang
  - ✓ Staf : 3 orang
3. Tenaga Kesekretariatan
  - ✓ Sekretaris : 1 orang
  - ✓ Kasubbag : 3 orang
  - ✓ Staf : 2 orang

Beban perkara pada tahun 2021 untuk perkara perdata sebanyak 43 perkara gugatan, 111 perkara Gugatan Sederhana dan 17 perkara permohonan. Untuk perkara pidana sebanyak 818 perkara pidana biasa, 33 perkara pidana anak, 11 perkara cepat dan 2366 perkara pidana lalu lintas. Dengan jumlah hakim dan ASN yang ada, sangatlah tidak sebanding dengan jumlah beban perkara yang ada. Beberapa tenaga kepaniteraan akhirnya ada yang merangkap tugas. Begitu juga di bagian Kesekretariatan, ada yang memegang dan menjadi operator beberapa aplikasi.

#### **A.6 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program kerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2021 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

#### **1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan**

Administrasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Penyelenggaraan layanan dukung manajemen pengadilan, yang terdiri dari:
  - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
  - Pelayanan Umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
  - Pembayaran gaji dan tunjangan
  - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Layanan Sarana dan Prasarana internal, yang terdiri dari :
  - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
  - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

## **3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu.

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

## 1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2020 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Belanja   | Anggaran Semula   | Realisasi         | Persentase Realisasi |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Belanja Pegawai | Rp. 3,864,875,000 | Rp. 3,809,150,516 | 98,56%               |
| 2  | Belanja Barang  | Rp. 1,217,739,000 | Rp. 1,203,187,576 | 98,81%               |
| 3  | Belanja Modal   | Rp. 65,000,000    | Rp. 64,774,000    | 99,65%               |

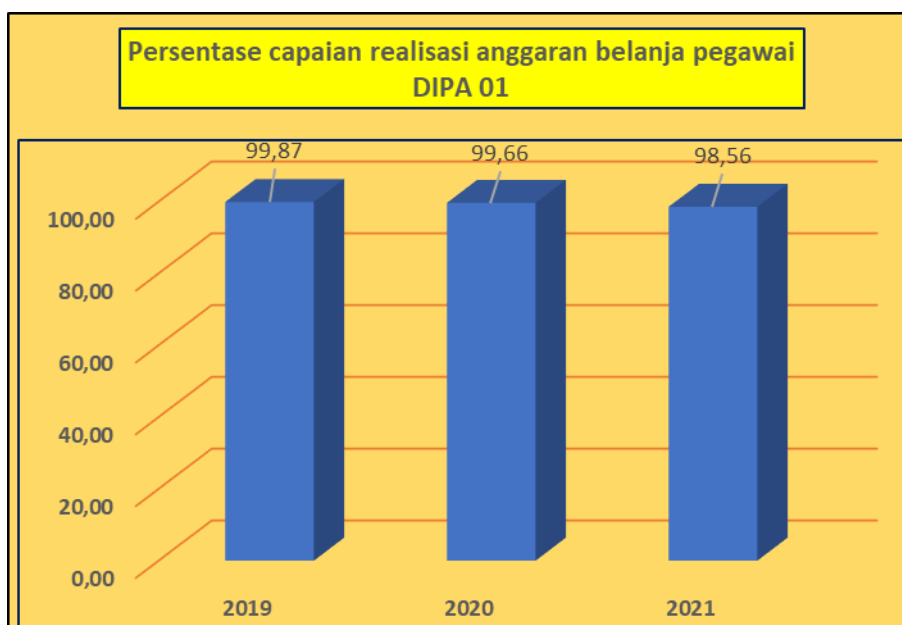
### a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2021 Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 3,864,875,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,809,150,516,- persentase capaian realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar 98,56% yang artinya belanja pegawai telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA<br>BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN<br>UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021<br>(dalam rupiah) |                                                                           |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 005                                                                                                                |                                                                           | MAHKAMAH AGUNG               |                         |                   |                      | Kode Lap. : LRBSB 01        |                           |                      |               |
| ESKELON I : 01                                                                                                                                  |                                                                           | BADAN URUSAN ADMINISTRASI    |                         |                   |                      | Tanggal : Senin, 31 Januari |                           |                      |               |
| WILAYAH/PROVINSI : 1100                                                                                                                         |                                                                           | SUMATERA SELATAN             |                         |                   |                      | Halaman : 1                 |                           |                      |               |
| SATUAN KERJA : 098991                                                                                                                           |                                                                           | PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM |                         |                   |                      | Prog. Id : lu_rabstkb       |                           |                      |               |
| JENIS SATUAN KERJA : KD                                                                                                                         |                                                                           | KANTOR DAERAH                |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| KODE                                                                                                                                            | URAIAN                                                                    | ANGGARAN SEMULA              | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |                             |                           | % REALISASI ANGGARAN | SIGA ANGGARAN |
|                                                                                                                                                 |                                                                           |                              |                         | BULAN INI         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI  | JUMLAH NETO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                         | 3                            | 4                       | 5                 | 6                    | 7                           | 8                         | 9                    | 10            |
| 01                                                                                                                                              | TRANSAKSI KAS                                                             |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 0                                                                                                                                               | RUPIAH MURNI                                                              |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 03                                                                                                                                              | KETERANGAN DAN KEAMANAN                                                   |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 04                                                                                                                                              | PERADILAN                                                                 |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| WA                                                                                                                                              | Program Dukungan Manajemen                                                |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 1066                                                                                                                                            | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| EAA                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                       |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 51                                                                                                                                              | BELANJA PEGAWAI                                                           |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 5111                                                                                                                                            | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS                                            |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |
| 511111                                                                                                                                          | Belanja Gaji Pokok PNS                                                    | 1.607.081.000                | 1.528.791.000           | 111.379.260       | 1.522.730.480        | 0                           | 1.522.730.480             | 99.60                | 6.050.520     |
| 511119                                                                                                                                          | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                               | 24.000                       | 27.000                  | 1.825             | 25.071               | ( 126)                      | 24.945                    | 92.39                | 2.055         |
| 511121                                                                                                                                          | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                                             | 156.230.000                  | 123.230.000             | 8.202.994         | 113.745.322          | 0                           | 113.745.322               | 92.30                | 9.484.678     |
| 511122                                                                                                                                          | Belanja Tunj. Anak PNS                                                    | 35.163.000                   | 35.463.000              | 2.074.513         | 35.364.533           | 0                           | 35.364.533                | 99.72                | 96.467        |
| 511123                                                                                                                                          | Belanja Tunj. Struktural PNS                                              | 28.140.000                   | 28.140.000              | 2.010.000         | 28.140.000           | 0                           | 28.140.000                | 100.00               | 0             |
| 511124                                                                                                                                          | Belanja Tunj. Fungsional PNS                                              | 1.557.290.000                | 1.564.290.000           | 113.770.000       | 1.564.025.000        | 0                           | 1.564.025.000             | 99.98                | 265.000       |
| 511125                                                                                                                                          | Belanja Tunj. PPH PNS                                                     | 213.195.000                  | 160.195.000             | 9.459.225         | 152.441.116          | 0                           | 152.441.116               | 95.16                | 7.756.854     |
| 511126                                                                                                                                          | Belanja Tunj. Beras PNS                                                   | 94.736.000                   | 97.036.000              | 7.024.740         | 96.753.120           | 0                           | 96.753.120                | 99.71                | 262.880       |
| 511129                                                                                                                                          | Belanja Uang Makan PNS                                                    | 321.360.000                  | 309.040.000             | 35.319.000        | 280.941.000          | 0                           | 280.941.000               | 90.91                | 28.099.000    |
| 511151                                                                                                                                          | Belanja Tunjangan Umum PNS                                                | 18.670.000                   | 18.670.000              | 920.000           | 14.985.000           | 0                           | 14.985.000                | 80.26                | 3.685.000     |
|                                                                                                                                                 | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111                                          | 4.031.892.000                | 3.864.875.000           | 290.761.560       | 3.809.150.542        | ( 126)                      | 3.809.150.516             | 98.56                | 55.724.454    |
|                                                                                                                                                 | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51                                                | 4.031.892.000                | 3.864.875.000           | 290.761.560       | 3.809.150.542        | ( 126)                      | 3.809.150.516             | 98.56                | 55.724.454    |
| 52                                                                                                                                              | BELANJA BARANG                                                            |                              |                         |                   |                      |                             |                           |                      |               |

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya****Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai**

| Jenis Belanja   | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%) |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|                 | Tahun 2019                                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Belanja Pegawai | 99,87%                                       | 99,66%     | 98,56%     |

**Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01  
Tahun 2019 sd Tahun 2021**

Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selama 3 tahun (2019 sd 2021) diatas 99%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah terserap dengan baik.

**b) Belanja Barang**

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pada tahun 2021 Anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 1,217,739,000, dan realisasi sebesar Rp. 1,203,187,576,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2021 sebesar 98,81% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005      MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : 01      BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 1100      SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : 098991      PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

JENIS SATUAN KERJA : KD      KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01

Tanggal : Senin, 31 Januari

Halaman : 2

Prog.Id : lu\_irabstkb

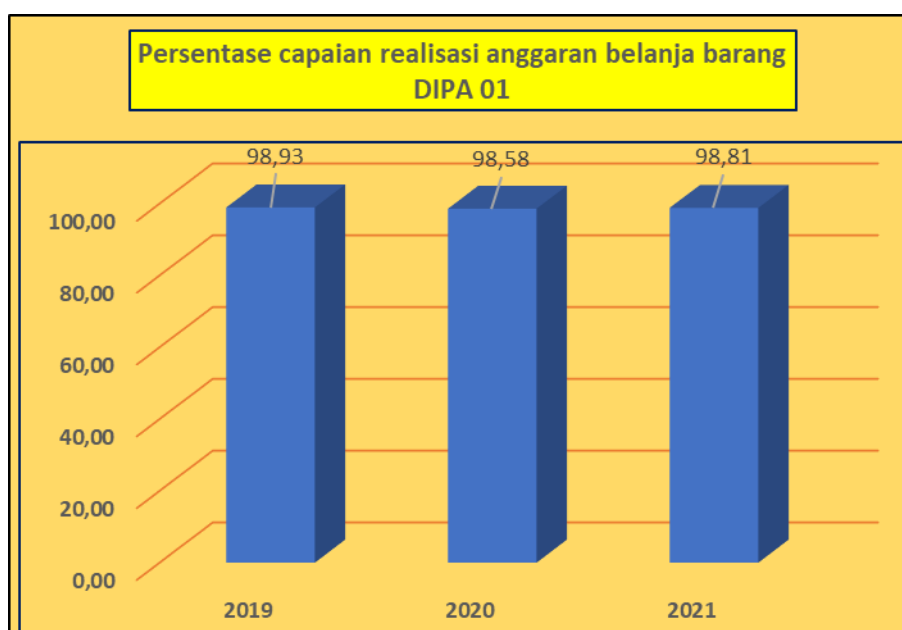
| KODE   | URAIAN                                                   | ANGGARAN SEMULA    | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |                            |                           | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN    |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|        |                                                          |                    |                         | BULAN INI         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETO S/D BULAN INI |                      |                  |
| 1      | 2                                                        | 3                  | 4                       | 5                 | 6                    | 7                          | 8                         | 9                    | 10               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                               |                    |                         |                   |                      |                            |                           |                      |                  |
| 521111 | Belanja Kebutuhan Perkantoran                            | 389,440,000        | 377,441,000             | 43,150,012        | 376,089,347          | 0                          | 376,089,347               | 99.64                | 1,351,653        |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 24,000,000         | 26,400,000              | 0                 | 26,241,786           | 0                          | 26,241,786                | 99.40                | 158,214          |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                   | 55,440,000         | 55,440,000              | 3,970,000         | 47,640,000           | 0                          | 47,640,000                | 85.93                | 7,800,000        |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 40,060,000         | 55,120,000              | 0                 | 55,057,827           | 0                          | 55,057,827                | 99.69                | 62,173           |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 6,400,000          | 6,400,000               | 0                 | 6,391,000            | 0                          | 6,391,000                 | 99.86                | 9,000            |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>                  | <b>515,340,000</b> | <b>520,801,000</b>      | <b>47,120,012</b> | <b>511,419,960</b>   | <b>0</b>                   | <b>511,419,960</b>        | <b>98.20</b>         | <b>9,381,040</b> |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                                |                    |                         |                   |                      |                            |                           |                      |                  |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 46,659,000         | 48,158,000              | 0                 | 48,147,440           | 0                          | 48,147,440                | 99.98                | 10,560           |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>                  | <b>46,659,000</b>  | <b>48,158,000</b>       | <b>0</b>          | <b>48,147,440</b>    | <b>0</b>                   | <b>48,147,440</b>         | <b>99.98</b>         | <b>10,560</b>    |
| 5221   | Belanja Jasa                                             |                    |                         |                   |                      |                            |                           |                      |                  |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                                | 108,000,000        | 118,200,000             | 10,053,665        | 113,910,238          | 0                          | 113,910,238               | 96.37                | 4,289,762        |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon                                | 6,360,000          | 3,660,000               | 301,395           | 3,616,353            | 0                          | 3,616,353                 | 98.81                | 43,647           |
| 522113 | Belanja Langganan Air                                    | 10,800,000         | 10,800,000              | 0                 | 10,289,820           | 0                          | 10,289,820                | 95.28                | 510,180          |
| 522141 | Belanja Sewa                                             | 45,360,000         | 45,360,000              | 0                 | 45,360,000           | 0                          | 45,360,000                | 100.00               | 0                |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>                  | <b>170,520,000</b> | <b>178,020,000</b>      | <b>10,355,060</b> | <b>173,176,411</b>   | <b>0</b>                   | <b>173,176,411</b>        | <b>97.28</b>         | <b>4,843,589</b> |
| 5231   | Belanja Pemeliharaan                                     |                    |                         |                   |                      |                            |                           |                      |                  |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                 | 219,800,000        | 270,800,000             | 0                 | 270,758,843          | 0                          | 270,758,843               | 99.98                | 41,157           |
| 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya         | 68,000,000         | 68,000,000              | 0                 | 67,997,610           | 0                          | 67,997,610                | 100.00               | 2,390            |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                 | 98,900,000         | 98,900,000              | 0                 | 98,889,592           | 0                          | 98,889,592                | 99.99                | 10,408           |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>                  | <b>386,700,000</b> | <b>437,700,000</b>      | <b>0</b>          | <b>437,646,045</b>   | <b>0</b>                   | <b>437,646,045</b>        | <b>99.99</b>         | <b>53,955</b>    |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri                          |                    |                         |                   |                      |                            |                           |                      |                  |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                                 | 78,460,000         | 28,060,000              | 1,500,000         | 27,870,900           | 0                          | 27,870,900                | 99.33                | 189,100          |

| KODE   | URAIAN                                                       | ANGGARAN SEMULA      | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA  |                      |                            |                           | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN     |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                            | 3                    | 4                       | BULAN INI          | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETO S/D BULAN INI | 5                    | 10                |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>                      | <b>78,460,000</b>    | <b>28,060,000</b>       | <b>1,500,000</b>   | <b>27,870,900</b>    | <b>0</b>                   | <b>27,870,900</b>         | <b>99.33</b>         | <b>189,100</b>    |
|        | <b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA S2</b>                            | <b>1,197,679,000</b> | <b>1,212,739,000</b>    | <b>58,975,072</b>  | <b>1,198,260,756</b> | <b>0</b>                   | <b>1,198,260,756</b>      | <b>98.81</b>         | <b>14,478,244</b> |
|        | <b>JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAA</b>                           | <b>5,229,571,000</b> | <b>5,077,614,000</b>    | <b>349,736,632</b> | <b>5,007,411,398</b> | <b>( 126)</b>              | <b>5,007,411,272</b>      | <b>98.62</b>         | <b>70,202,728</b> |
| EAC    | Layanan Umum                                                 |                      |                         |                    |                      |                            |                           |                      |                   |
| S2     | BELANJA BARANG                                               |                      |                         |                    |                      |                            |                           |                      |                   |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                               |                      |                         |                    |                      |                            |                           |                      |                   |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 5,000,000            | 5,000,000               | 0                  | 4,927,000            | 0                          | 4,927,000                 | 98.54                | 73,000            |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>                      | <b>5,000,000</b>     | <b>5,000,000</b>        | <b>0</b>           | <b>4,927,000</b>     | <b>0</b>                   | <b>4,927,000</b>          | <b>98.54</b>         | <b>73,000</b>     |
|        | <b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA S2</b>                            | <b>5,000,000</b>     | <b>5,000,000</b>        | <b>0</b>           | <b>4,927,000</b>     | <b>0</b>                   | <b>4,927,000</b>          | <b>98.54</b>         | <b>73,000</b>     |
|        | <b>JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAC</b>                           | <b>5,000,000</b>     | <b>5,000,000</b>        | <b>0</b>           | <b>4,927,000</b>     | <b>0</b>                   | <b>4,927,000</b>          | <b>98.54</b>         | <b>73,000</b>     |
|        | <b>JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066</b>                          | <b>5,234,571,000</b> | <b>5,082,614,000</b>    | <b>349,736,632</b> | <b>5,012,338,398</b> | <b>( 126)</b>              | <b>5,012,338,272</b>      | <b>98.62</b>         | <b>70,275,728</b> |



**Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya****Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang**

| Jenis Belanja  | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%) |            |            |
|----------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|                | Tahun 2019                                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Belanja Barang | 98,93                                        | 98,58      | 98,81      |

**Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01  
Tahun 2019 sd Tahun 2021**

Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selamat 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 98,93%, ; 98,58%; 98,81%.

**c) Belanja Modal**

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Yang terdiri Belanja Modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat belanja modal untuk alat pengolah data pendukung kepaniteraan berupa 3 (tiga) buah PC Komputer untuk panitera dan 1 (satu) unit mesin antrian sidang.

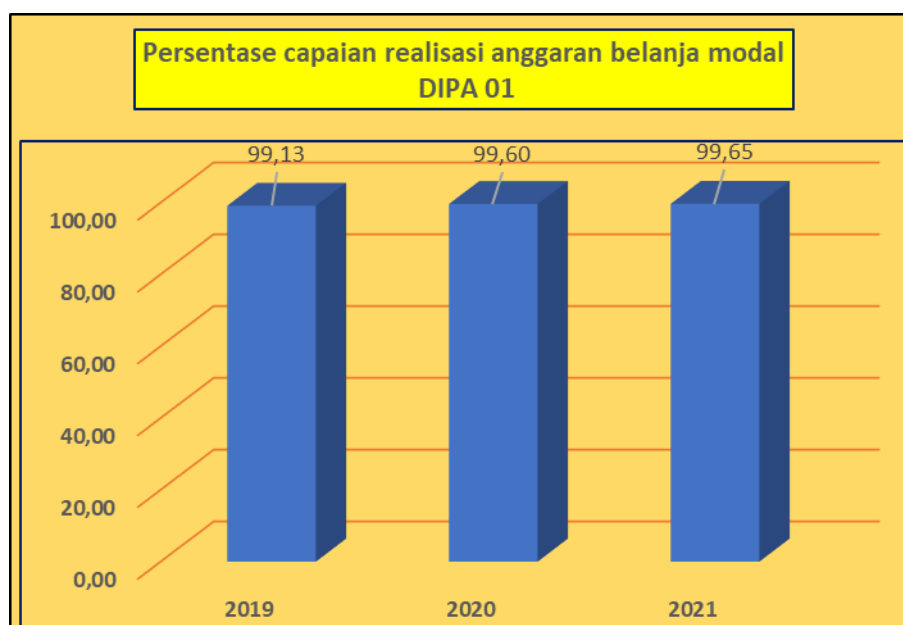
Pada tahun 2021 Anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 65,000,000,- dan realisasi sebesar 64,774,000,- persentase capaian realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar 99,65% yang artinya belanja modal telah terserap keseluruhan dengan baik.

### **Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal**

| Jenis Belanja | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%) |            |            |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|               | Tahun 2019                                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Belanja Modal | 99,13                                        | 99,60      | 99,65      |

**Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01  
Tahun 2019 sd Tahun 2021**



Pada tabel dan grafik di atas, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Seluruh belanja modal telah di realisasikan seluruhnya. Hal ini berarti anggaran belanja modal telah terserap dengan baik. Belanja modal yang berupa peralatan dan mesin telah dimanfaatkan untuk menunjang peradilan berbasis Teknologi Informasi di Kepaniteraan.

## 2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Belanja  | Anggaran Semula | Realisasi    | Persentase Realisasi |
|----|----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 1  | Belanja Barang | 325,693,000     | 325,1766,300 | 98,84%               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 099232 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
 Tanggal : Senin, 31 Januari  
 Halaman : 1  
 Prog.Id : lu\_rabstkb

| KODE   | URAIAN                                    | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |                           |                           | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                           |                 |                         | BULAN INI         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                         | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7                         | 8                         | 9                    | 10            |
|        | TRANSAKSI KAS                             |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 01     | RUPIAH MURNI                              |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 0      | RM                                        |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 03     | KETERTIBAN DAN KEAMANAN                   |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 04     | PERADILAN                                 |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| BF     | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum     |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 1049   | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum      |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| BCA    | Perkara Hukum Perseorangan                |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 52     | BELANJA BARANG                            |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | 4,150,000       | 6,170,000               | 1,143,092         | 5,742,625            | 0                         | 5,742,625                 | 93.07                | 427,375       |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211          | 4,150,000       | 6,170,000               | 1,143,092         | 5,742,625            | 0                         | 5,742,625                 | 93.07                | 427,375       |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional            |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 521211 | Belanja Bahan                             | 94,130,000      | 83,470,000              | 4,170,000         | 83,437,000           | 0                         | 83,437,000                | 99.96                | 33,000        |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212          | 94,130,000      | 83,470,000              | 4,170,000         | 83,437,000           | 0                         | 83,437,000                | 99.96                | 33,000        |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                 |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 105,153,000     | 114,202,000             | 291,500           | 114,156,675          | 0                         | 114,156,675               | 99.96                | 45,325        |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218          | 105,153,000     | 114,202,000             | 291,500           | 114,156,675          | 0                         | 114,156,675               | 99.96                | 45,325        |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri           |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota       | 83,860,000      | 83,451,000              | 8,680,000         | 83,440,000           | 0                         | 83,440,000                | 99.99                | 11,000        |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241          | 83,860,000      | 83,451,000              | 8,680,000         | 83,440,000           | 0                         | 83,440,000                | 99.99                | 11,000        |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                | 287,293,000     | 287,293,000             | 14,284,592        | 286,776,300          | 0                         | 286,776,300               | 99.82                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA KRO 1049.BCA               | 287,293,000     | 287,293,000             | 14,284,592        | 286,776,300          | 0                         | 286,776,300               | 99.82                | 516,700       |
| QBA    | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan        |                 |                         |                   |                      |                           |                           |                      |               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
ESELON I : 03  
WILAYAH/PROVINSI : 1100  
SATUAN KERJA : 099232  
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG  
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
SUMATERA SELATAN  
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01  
Tanggal : Senin, 31 Januari  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_lrabstkb

| KODE   | URAIAN                                              | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |                            |                           | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                     |                 |                         | BULAN INI         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                   | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7                          | 8                         | 9                    | 10            |
| 52     | BELANJA BARANG                                      |                 |                         |                   |                      |                            |                           |                      |               |
| 5221   | Belanja Jasa                                        |                 |                         |                   |                      |                            |                           |                      |               |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultan                              | 38,400,000      | 38,400,000              | 3,200,000         | 38,400,000           | 0                          | 38,400,000                | 100.00               | 0             |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221                    | 38,400,000      | 38,400,000              | 3,200,000         | 38,400,000           | 0                          | 38,400,000                | 100.00               | 0             |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                          | 38,400,000      | 38,400,000              | 3,200,000         | 38,400,000           | 0                          | 38,400,000                | 100.00               | 0             |
|        | JUMLAH BELANJA KRO 1049/QBA                         | 38,400,000      | 38,400,000              | 3,200,000         | 38,400,000           | 0                          | 38,400,000                | 100.00               | 0             |
|        | JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1049                        | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF                     | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04                     | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA FUNGSI 03                            | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0                     | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01                       | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD                      | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH TRANSAKSI KAS                                | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |
|        | JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS | 325,693,000     | 325,693,000             | 17,484,592        | 325,176,300          | 0                          | 325,176,300               | 99.84                | 516,700       |

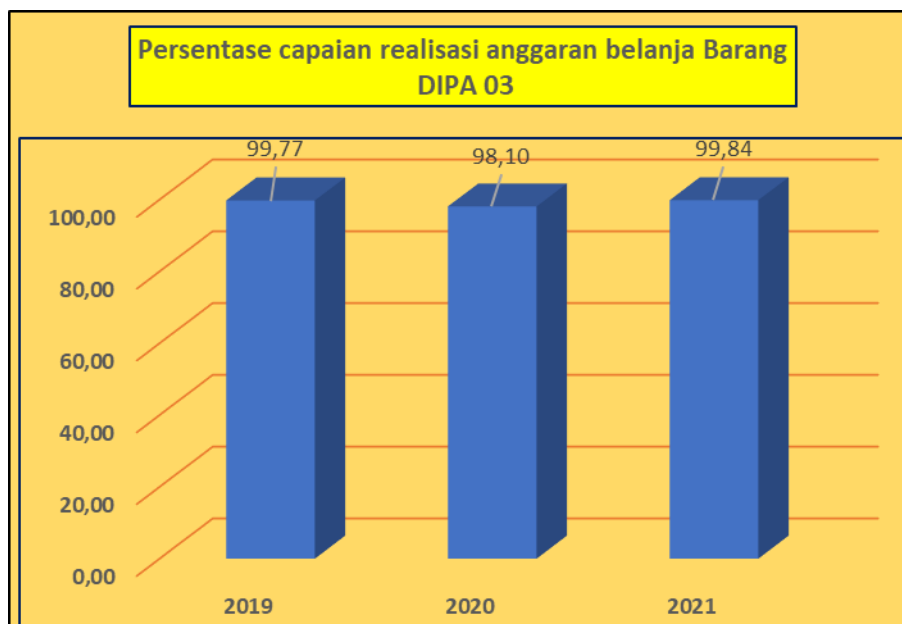
Pada tahun 2021 Anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar Rp. 325,693,000 ,- dan realisasi sebesar Rp. 325,176,300 ,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2020 sebesar 99,84% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

### Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

**Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja barang DIPA 03**

| Jenis Belanja  | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%) |            |            |
|----------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|                | Tahun 2019                                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Belanja barang | 99,77                                        | 98,10      | 99,84      |

**Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2018 sd Tahun 2021**

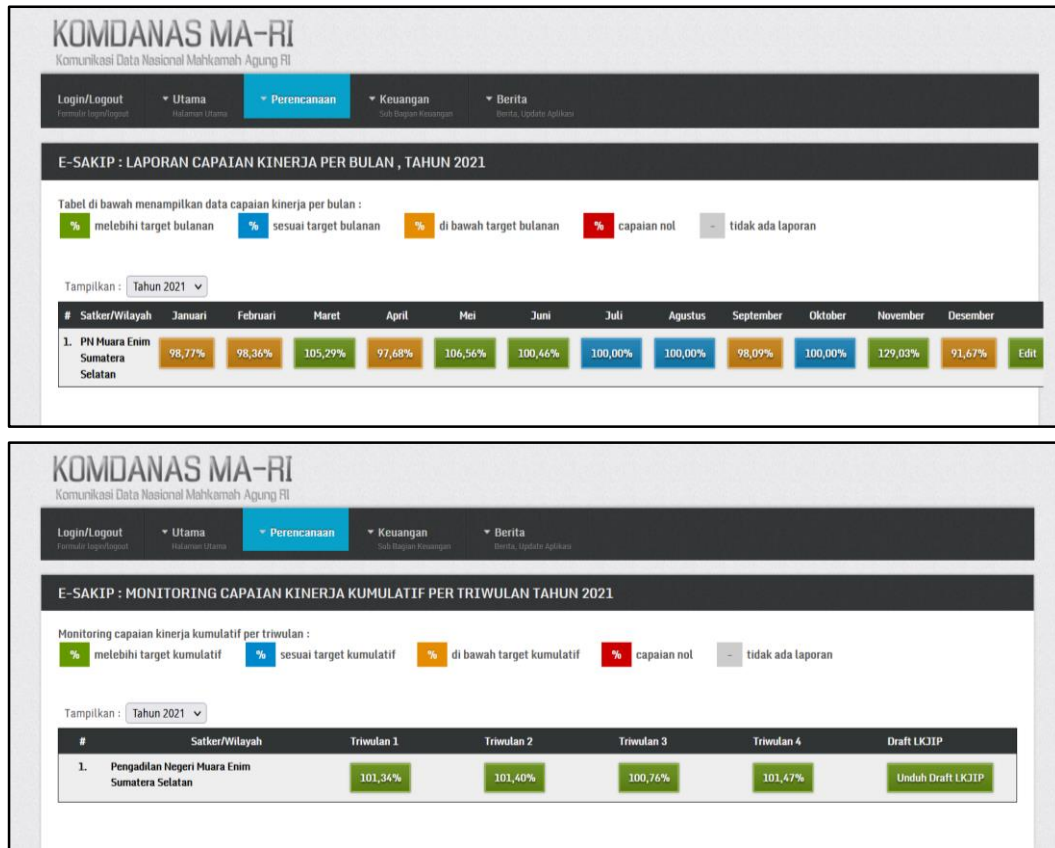


Pada tabel dan grafik di atas, selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2021, capaian anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar 99,77%, 98,10% dan 99,84% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

### C. MONITORING DAN EVALUASI

Agar realisasi dan capaian kinerja dapat semakin baik, maka sangat diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan cara :

1. Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI dengan link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>



Realisasi di dapatkan dengan memasukkan data input dan ouput yang terdapat dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim setiap bulannya dalam aplikasi Komdanas.

- Melaksanakan rapat bulanan untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah di supervisi dan dilaksanakan pembahasan-pembahasan, sesuai dengan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) tahun 2020 Nomor : W6-U/2933/OT.01.1/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.

Adapun perbaikan dari hasil evaluasi tersebut adalah :

**A. Perencanaan Kinerja**

- Renstra Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program
- Target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas)
- Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas)

**B. Pengukuran Kinerja**

- Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 telah ditetapkan dan menggambarkan kualitas kinerja sesuai dengan IKU yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas). IKU telah digunakan dalam Renstra, RKT dan PKT.

**C. Pelaporan Kinerja**

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk empat Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator Kinerjanya.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) telah menyajikan data bulanan perkara pidana dan perdata dan data pembandingnya tahun lalu. Data pembanding realisasi kinerja selama tiga tahun (2019-2021), realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2019 dan 2020 seluruh Indikator Kinerja.

**D. Evaluasi Internal**

- Evaluasi internal dilaksanakan dengan menggunakan Ceklist kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengisian realisasi masing-masing IKU pada e-SAKIP setiap bulannya.

# **BABIV PENUTUP**

## **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres ) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2021 yang dituangkan menjadi 4 target sasaranstrategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2021 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.



Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

## **B. SARAN**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplin tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

# LAMPIRAN



## STRUKTUR ORGANISASI





## LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021

### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri MuaraEnim  
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung  
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri MuaraEnim  
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri MuaraEnim  
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri MuaraEnim

| No | Tujuan                                                                                                                                    |                                                                            | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis                                                  |                                                   | Target (%) |            |            |            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
|    | Uraian                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                          |                                  | Uraian                                                             | Indikator Kinerja                                 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 |
| 1. | <b><i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i></b>  | <b><i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i></b> | <b>80 %</b>                      | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100  |
| 2. | <b><i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan A kuntabel</i></b> | <b><i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i></b> | <b>80 %</b>                      |                                                                    | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100  |

**LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

|    |                                                                                                                                   |                                                                     |             |  |                                                              |            |            |            |            |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 3. | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |  | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 4. | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |  | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 5. | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |  | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 6. | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses</i>                                                | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |

**LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021**

|     |                                                                                                                                   |                                                                     |             |                                     |                                                                         |            |            |            |            |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|     | <i>peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>                                                                             |                                                                     |             |                                     |                                                                         |            |            |            |            |     |
| 7.  | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |                                     | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 8.  | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |                                     | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi         | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   | 5   |
| 9.  | <i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> | <i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i> | <b>80 %</b> |                                     | Index Kepuasan Pencari Keadilan                                         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 10. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan</i>                                                                               | <i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>                         | <b>90 %</b> | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang                         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |

**LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021**

|     | <i>perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>                                              | <i>tepat waktu</i>                                      |             | Penyelesaian Perkara | dikirim kepada Para Pihak tepat waktu                                                                          |            |            |            |            |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 11. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i> | <i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i> | <b>90 %</b> |                      | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu                           | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 12. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i> | <i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i> | <b>90 %</b> |                      | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                                           | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   | 5   |
| 13. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i> | <i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i> | <b>90 %</b> |                      | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |
| 14. | <i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i> | <i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i> | <b>90 %</b> |                      | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online                  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 100 |

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

|     |                                                                                              |                                                                                    |                    |                                                                       |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                              |                                                                                    |                    |                                                                       | dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. | <b><i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i></b> | <b><i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i></b>                  | <b><i>100%</i></b> | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <b><i>100</i></b> | <b><i>100</i></b> | <b><i>100</i></b> | <b><i>100</i></b> | <b><i>100</i></b> |
| 16. | <b><i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i></b>                   | <b><i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i></b> | <b><i>80 %</i></b> | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | <b><i>100</i></b> | <b><i>80</i></b>  | <b><i>5</i></b>   | <b><i>5</i></b>   | <b><i>5</i></b>   |

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM****ELVIN ADRIAN, SH, MH**  
**NIP 19790111 200212 1004**





REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

| NO | KINERJA UTAMA                                                      | INDIKATOR KINERJA                                        | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara <b>Perdata</b> yang Diselesaikan | <div>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</div> <div>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100 %</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li></ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. |                                                                    | Persentase Sisa Perkara <b>Pidana</b> yang Diselesaikan  | <div>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</div> <div>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100 %</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                     |



## LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021

|    |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                     |
|----|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|    |  |                                                                        | jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                     |
| 3. |  | Persentase Perkara<br><br><b>Perdata</b> yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$<br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li></ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. |  | Persentase perkara<br><br><b>pidana</b> yang diselesaikan tepat waktu  | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$<br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li></ul>     | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021**

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                                     |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------|
| 5. |  | Persentase Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding<br>Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding<br>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6. |  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi<br>$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. |  | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali<br>$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$<br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput</li></ul> | 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021**

|     |                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                       | dalam jangka waktu tahunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                     |
| 8.  |                                                          | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                       | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 9.  |                                                          | Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                       | $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$<br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li></ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 10. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$<br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li></ul>          | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



## LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 11. |  | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada paraPihak</li> </ul> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak<br/>Tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>100%</p>                                                | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |
| 12. |  | <p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>100%</p>                                                                                 | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |
| 13. |  | <p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>100%</p> | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |



# LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

|     |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 14. |                                                                       | Persentase Putusan Perkarayang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                     | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |
| 15. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                  | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                      | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |
| 16. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara <b>Perdata</b> yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                                                  | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dandimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHTdandimohonkan untuk dieksekusi pada bulan</li> </ul> | Panitera | LaporanBulanan dan LaporanTahunan |



---

---

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2021**

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**ELWIN ADRIAN, SH, MH**  
**NIP 19790111 200212 1004**